

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu poin perubahan yang signifikan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 dibanding Undang-Undang Sisdiknas tahun-tahun sebelumnya ialah pendeklarasian konsep pembelajaran dalam sistem pendidikan nasional. Konsep pembelajaran merupakan perubahan dari konsep kegiatan belajar mengajar yang memiliki makna lebih dalam dan luas.

Pembelajaran merupakan sebuah proses interaksi antara peserta didik atau siswa dengan sumber belajar dalam suatu lingkungan yang dikelola dengan sengaja agar tercapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan.¹

Sebuah pembelajaran akan berjalan dengan baik jika berlangsung interaksi yang intens antara siswa, sumber

¹ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Jakarta: CV. Mini Jaya Abadi, 2003)., h. 9.

belajar dan lingkungan yang telah direkayasa sedemikian rupa oleh Guru dan Sekolah. Dari konsep pembelajaran seperti inilah, maka lahir pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yaitu peserta didik memiliki pengalaman langsung dalam interaksinya dengan sumber belajar dan media belajar agar terbentuk pembelajaran yang bermakna.

Akan tetapi kondisi derasnya arus budaya dalam era globalisasi akhir-akhir ini cukup memberikan kekhawatiran tersendiri bagi umat Islam di Indonesia. Budaya kebarat-baratan dan semacamnya semakin tumbuh dalam masyarakat Indonesia saat ini. Kekhawatiran itu kian bertambah ketika mulai maraknya gejala kemerosotan moral yang bukan hanya dialami oleh peserta didik, tetapi juga menghinggapi orang-orang yang dianggap ‘pintar’ dalam berbagai bidang kehidupan, misalnya dalam bidang budaya, ekonomi, politik, bahkan agama. Maka kemudian lahirlah aksi penyelewengan, penipuan, penindasan, korupsi, sogok-menyogok dan lainnya

yang menutupi kejujuran, keadilan, kebenaran, tolong-menolong dan kasih sayang.²

Perkembangan zaman yang semakin pesat telah membawa perubahan alam pikir manusia, termasuk di dalamnya perubahan paradigma dalam peningkatan kualitas pendidikan. sesuai Dengan arahan Dirjen Dikdasmen, paradigma penting dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan adalah: (1) *teaching ke learning*; (2) dari pupil atau *student ke learner*; (3) dari proses *learning* bisa terjadi di sekolah, rumah maupun kantor untuk membentuk *the learning society*. Lebih lanjut UNESCO memberikan empat pilar prinsip dasar untuk menuju paradigma baru, yaitu : (1) *learning to know*; (2) *learning to do*; (3) *learning to live together*; (4) *learning to be*.³

Pentingnya Pendidikan tersebut karena keberhasilan pembangunan nasional ditentukan terutama oleh sumber daya manusianya. Hal ini berarti sumber daya manusialah yang menggerakkan roda pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka sumber daya manusia sebagai aset nasional yang mendasar dan penentu utama keberhasilan pembangunan. Kualitas sumber daya manusia harus ditingkan terus seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan agama. Sedangkan, sarana yang paling

² Abudin Nata, *Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenda Media 2003), h. 189

³ Kisupriyoko, *Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional*, (Yogyakarta : Pustakan Fahima 2007), h. 6

strategis bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan formal yaitu Sekolah.

Jelaslah bahwa pendidikan harus terus menerus ditingkatkan, khususnya bagi lembaga pendidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar dan berat dalam menyiapkan peserta didik yang berkualitas. Salah satu unsur penting yang sangat kuat berkaitan dengan pendidikan adalah kepemimpinan Kepala Sekolah/Madrasah. Kepala Sekolah/Madrasah adalah pemimpin pendidikan yang mempunyai peran yang sangat besar dalam meningkatkan mutu pendidikan Sekolah. Oleh karena itu, ia harus yakin bahwa aggotanya memerlukan standar, harapan dan kinerja yang bermutu tinggi. Selain itu, ia harus yakin bahwa visi Sekolah harus meneankan standar pelajaran yang tinggi. Ketercapaian tujuan pendidikan sangat bergantung pada kecakapan dan kebijaksanaan Kepala Madrasah sebagai seorang pemimpin pendidikan. Hal ini dikarenakan Kepala Madrasah sebagai seorang pemimpin

yang bertanggung jawab terhadap terlaksananya pencapaian tujuan.

Selain itu, menjadi Kepala Madrasah/Sekolah Profesional perlu dimulai dari pengangkatan yang profesional, bahkan perlu dipilih dalam kurun waktu tertentu dan setelah itu diadakan lagi pemilihan yang baru dan Kepala Madrasah yang lama kembali menjadi guru. Hal ini akan menimbulkan iklim demokratis di Sekolah yang akan terdorong iklim yang kondusif bagi terciptanya kualitas pembelajaran yang optimal untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik. Hanya dengan cara demikianlah, akan tumbuh Kepala Sekolah yang profesional yang siap mendorong Visi Menjadi Aksi dalam paradigma baru manajemen pendidikan.⁴

Apabila seorang Kepala Sekolah/Madrasah tidak bisa mengatur, mempengaruhi, mengajak anggotanya untuk meraih tujuan pendidikan. Kurang bisa memanfaatkan peluang yang ada, dan cenderung menerapkan gaya kepemimpinan

⁴ E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. vii

yang sekedar melaksanakan tugas rutin, maka jangan diharapkan mutu pendidikan akan mengalami peningkatan sehingga kepemimpinan Kepala Sekolah merupakan salah satu faktor yang menentukan kesuksesan dalam mengembangkan lembaga pendidikan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nurkholis setidaknya ada empat alasan kenapa diperlukan figur seorang pemimpin, yaitu : (1) banyak orang yang memerlukan figur pemimpin; (2) dalam beberapa situasi seorang pemimpin perlu tampil mewakili kelompoknya; (3) sebagai tempat pengambil alihan resiko bila terjadi tekanan terhadap kelompoknya; dan (4) sebagai tempat untuk meletakkan kekuasaan.⁵

Menurut E Mulyasa, Kepala Sekolah harus mampu melaksanakan pekerjaannya sebagai edukator, manajer, administrator, dan supervisor (EMAS). Dalam perkembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman, Kepala Sekolah juga harus mampu berperan sebagai *leader*, inovator, motivator dan

⁵ Nurkholis, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Jakarta : PT. Grasindo, 2005), h.152

enterpraineur di Sekolahnya. Mutu Sekolah sebagai salah satu indikator untuk melihat produktifitas dan erat hubungannya dengan masalah pengelolaan atau manajemen pada Sekolah. Hal ini dapat dikaitkan dengan pernyataan “kegagalan mutu dalam suatu organisasi disebabkan oleh kelemahan manajemen”.⁶

Adapun istilah Kepala Sekolah berasal dari dua kata yaitu Kepala dan Sekolah. Kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin, sedangkan Sekolah diartikan sebuah tempat yang di dalamnya terdapat kegiatan belajar belajar. Sekolah juga bisa dinamakan sebagai rumah kedua, di mana anak tinggal lebih lama setelah rumah, dimana anak tinggal beberapa jam, tempat tinggal anak yang pada umumnya pada masa perkembangan, dan lembaga pendidikan dan tempat yang berfungsi mempersiapkan anak untuk menghidupi hidup.⁷

⁶ Rohiat, *Kecerdasan Kepemimpinan Kepala Sekolah*, (Bandung : PT. Refika Aditama 2008), h.3

⁷ Vaitzal Rifai, *Memimpin dalam Abad ke-21*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2004), h.253

Dengan demikian, Kepala Sekolah adalah seorang tenaga profesional atau guru yang diberikan tugas untuk memimpin Sekolah dimana Sekolah menjadi tempat interaksi antara seorang guru yang memberikan pelajaran dan siswa yang menerima pelajaran. Orang tua sebagai harapan pengguna lulusan sebagai penerima kepuasan dan masyarakat umum sebagai kebanggaan.⁸

Dalam realitas sejarah, madrasah tumbuh dan berkembang, dari oleh dan untuk masyarakat Islam. Sehingga sejak awal, Madrasah merupakan konsep pendidikan berbasis masyarakat (*community based education*). Masyarakat sebagai individu maupun organisasi dengan didorong semangat keagamaan atau dakwah membangun Madrasah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka, ini dapat dilihat dari prosentasi kepemilikan Madrasah di Indonesia yang tercatat 90% milik swasta dan

⁸ Ibrahim Bafadal, *Supervisi Pengajaran, teori dan aplikasi dalam Membina Profesional Guru*, (Jakarta : PT Bumi Aksara 1992), h.62

sisanya berstatus negeri, dan ini berbanding terbalik dengan sekolah-sekolah umum.⁹

Hingga hari ini, sebagaimana lembaga pendidikan pada umumnya, Madrasah masih dihadapkan pada sejumlah persoalan lama seperti kelemahan infrastruktur, sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, kualitas calon peserta didik, proses pembelajaran dan manajemen Madrasah. Masalah tersebut sebenarnya dilatarbelakangi oleh kondisi awal yang melibatkan banyak aspek.

Tingginya peran masyarakat dalam memberdayakan Madrasah ternyata belum dapat meningkatkan mutu pendidikan Madrasah secara signifikan. Persepsi kurang baik atas Madrasah atas lembaga pendidikan “kelas dua” belum dapat dijawab secara tuntas oleh para pengelola Madrasah. Bahkan di beberapa sisi Madrasah masih tampak sebagai “cagar budaya” untuk mempertahankan paham-paham keagamaan tertentu. Belum menambahkan mobilitas antar

⁹ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2005), h.184-185

generasi sehingga masih belum terlihat perannya sebagai pendidikan yang menjanjikan masa depan.¹⁰

Realita ini berbanding terbalik dengan tuntutan akan pendidikan bermutu yang semakin hari semakin kuat. Tingginya tuntutan akan pendidikan yang bermutu sudah seyogyanya direspon oleh para pengelola Madrasah dengan sikap yang rasional dan lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat secara luas, respon tersebut dijawabantahkan dalam bentuk strategi peningkatan mutu pendidikan yang selanjutnya diupayakan implementasinya secara bertahap.

Kemajuan suatu Madrasah dengan Madrasah lain tidaklah sama. Ada Madrasah yang memiliki segudang prestasi dan ada pula yang sangat miskin dengan prestasi, ada Madrasah yang sudah memiliki fasilitas yang lengkap dan ada pula yang sarana dan prasarana yang tidak layak atau bahkan belum memiliki fasilitas tersebut untuk digunakan dalam proses kegiatan belajar mengajar, ada Madrasah yang mempunyai manajemen Madrasah yang baik dan ada pula

¹⁰ A Malik Fajar, *Visi Pembaharuan Pendidikan Islam*, (Jakarta : LP3NI 1996), h.6

Madrasah yang memiliki manajemen yang kurang baik. Semua perbedaan itu terdapat banyak faktor yang melatar belaknginya.

Mutu pendidikan tercapai apabila masukan, proses, keluaran, guru, sarana dan prasarana serta biaya apabila seluruh komponen tersebut memenuhi syarat tertentu. Namun dari beberapa komponen tersebut lebih banyak berperan adalah tenaga kependidikan yang bermutu yaitu yang mampu menjawab tantangan-tantangan dengan cepat dan tanggung jawab. Tenaga kependidikan pada masa mendatang akan semakin kompleks, sehingga menuntut tenaga kependidikan untuk senantiasa melaksanakan berbagai peningkatan dan penyesuaian penguasaan kompetensinya.

Rupanya hal ini kemudian ditindaklanjuti secara baik oleh beberapa pengelola Madrasah dan beberapa lembaga pendidikan Islam lainnya. Setidaknya dalam sepuluhn tahun terakhir ini telah bermunculan beberapa lembaga pendidikan Islam yang menampilkan wajah baru menjadi lebih adaptif

dan responsif. Lembaga-lembaga pendidikan tersebut berusaha menampilkan pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan yang bermutu dan modern dari berbagai jenis dan jenjang.¹¹ Sebut saja Yayasan Pondok Pesantren Turus, Yayasan Pondok Pesantren Modern Al-Mizan Cikole, MTs Negeri 1 Model Pandeglang dan MTsN 1 Kota Serang. Bersamaan dengan munculnya beberapa Sekolah Islam tersebut Departemen Agama juga berupaya untuk menampilkan konsep Madrasah tersebut bermutu dengan beberapa kebijakan yang menunjuk beberapa Madrasah tertentu sebagai Madrasah unggulan dan percontohan atau juga disebut dengan Madrasah Model.

Mutu pendidikan merupakan salah satu isu sentral pendidikan nasional selain isu-isu pemerataan, relevansi, dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Perubahan UU No. 2 Tahun 1989 menjadi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas diikuti dengan pemberlakuan kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Penjaminan

¹¹ Sudarman Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah*, (Jakarta : Bumiaksara 2007), h.61

mutu pendidikan formal, non-formal, dan informal sebagaimana tersurat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, merupakan kegiatan yang sistematis dan terpadu pada penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa.

Undang-undang RI No.20 Pasal 40, ayat (2) tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi : Guru dan tenaga kependidikan berkewajiban :

1. Mencapai suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis ;
2. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan ;
3. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Sementara itu dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 19, ayat (1) dinyatakan bahwa: Proses pembelajaran pada satuan

pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, memberikan ruang gerak yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.¹²

Berdasarkan kenyataan di atas maka dapat dipahami bahwa di MTs Al-Falah Karangtanjung di Kabupaten Pandeglang saat ini sedang memasuki tahap perbaikan secara manajemen, kepemimpinan dan strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan yang diharapkan pihak yang terkait dengan madrasah. Karena itu, dilihat dari prespektif manajemen maka yang dilaksanakan adalah pembenahan manajemen dengan mengacu pada perbaikan mutu pendidikan. Hal ini terkait dengan upaya mengantisipasi semakin tinggi minat masyarakat dalam memilih MTs Al-Falah Karangtanjung untuk tempat belajar anak-anak mereka.

¹² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan, Bab IV, Pasal 19, ayat 1

Strategi kepemimpinan itu awalnya datang dari kompetisi yang terjadi untuk mencapai tujuan seperti memperebutkan daerah, untuk memperoleh keuntungan, untuk mempertahankan kehidupan, untuk mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan, kadang-kadang kompetisi untuk mencapai tujuan itu harus berlangsung melalui perkelahian, peperangan dan yang paling kuat bertahan. Kompetisi yang dimaksud di dalam lembaga pendidikan adalah untuk mempertahankan jabatan atau kedudukan, untuk mendapatkan pengakuan sehingga Sekolah tersebut diminati oleh guru, staf pegawai, siswa, masyarakat dan stake holder. Kepala Sekolah memiliki banyak strategi kepemimpinan untuk mempertahankan kedudukan yang nantinya para siswa, guru dan stake holder serta masyarakat merasa puas dan kemudian terciptanya iklim organisasi yang nyaman. Pada akhirnya Kepala Sekolah dapat membawa iklim yang efektif dan efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan. Inilah arti penting dari strategi Kepala Madrasah/Sekolah.

Jordan E. Aryan menyebutkan bahwa strategi kepemimpinan adalah kemampuan untuk berpikir dari segi bagaimana tindakan pemimpin bisa membantu organisasi untuk beradaptasi dengan dunia luar.¹³ Hal ini berarti bahwa pimpinan melakukan suatu evaluasi sebelum melakukan suatu tindakan, dengan melakukan perimbangan tentang kekuatan internal dan eksternal organisasi yang dimiliki baik dilihat dari kuantitas maupun kualitas, misalnya kehidupan setiap individu, jumlah kekuatan sarana prasarana pendukung, memberikan motivasi kepada setiap anggota. Sehingga strategi kepemimpinan akan menjadi suatu kerangka yang fundamental sebagai tempat organisasi menyatakan kontinuitasnya yang vital, dan pada saat yang bersamaan akan memiliki kekuatan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang selalu berubah-ubah.

Sesuai dengan kewenangannya, pemerintah menetapkan bahwa satuan pendidikan wajib menyesuaikan diri dengan berbagai ketentuan pada PP RI Nomor 19 Tahun

¹³ Jordan E. Ayan, *Bengkel Kreatif*, (Bandung : Kaifa 2002), h.31

2005. Itu berarti bahwa paling lambat pada tahun 2013 semua Sekolah jalur pendidikan formal termasuk MA dan MTs sudah memenuhi Standar Nasional Pendidikan bertaraf internasional.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul tesis yakni “Strategi dan Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Pada MTs Al-Falah Karangtanjung di Kabupaten Pandeglang”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang muncul, antara lain:

1. Ketika masyarakat mulai khawatir dengan rusaknya moral yang dialami oleh para peserta didik dan terlebih kerusakan ini juga ikut di alami oleh para orang-orang

¹⁴ Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar & Menengah, *Arah Penhembangan Manajemen Pendidikan Dasar & Menengah*, Depdiknas Tahun 2009.

yang dianggap “pintar” dalam hal ekonomi, politik, sosial dan budaya.

2. Kurangnya efektifnya pendidikan yang merupakan sarana utama atau kita sebut sebagai tiang dari suatu neagara untukmeningkatkan sumber daya manusianya dalam mengikuti perkembangan dunia
3. Lembaga pendidikan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk terus menerus meningkatkan kualitasnya agar pendidikan lebih bermutu dan dapat menyiapkan serta melahirkan lulusan yang berkualitas.
4. Tercapainya mutu pendidikan sangat bergantung pada kecakapan dan kebijaksanaan Kepala Madrasah dalam memimpin lembaga pendidikan
5. Memiliki strategi yang menjadi landasan seorang pemimpin dalam meningkatkan mutu pendidikan agar bisa menghasilkan generasi yang baik secara mental, akhlak, moral, kreatifitas dan inovatif.
6. Pentingnya strategi Kepala Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan agar bisa mencetak

generasi yang baik secara akhlak (moral) maupun mental serta kreatif dan inovatif.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi pada batasan masalah yang kelima yaitu “pentingnya strategi Kepala Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan agar bisa mencetak generasi yang baik secara akhlak (moral) maupun mental serta kreatif dan inovatif” yang kemudian diuraikan sebagai berikut:

1. Fokus penelitian ada pada strategi Kepala Madrasah dalam Upaya Peningkatan Mutu pada MTs Al-Falah Karangtanjung di Kabupaten Pandeglang.
2. Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan pada MTs Al-Falah Karangtanjung di Kabupaten Pandeglang.
3. Mutu pendidikan yang ada di MTs Al-Falah Karangtanjung.

4. Lokasi penelitian ini adalah MTs Al-Falah Karangtanjung di Kabupaten Pandeglang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok masalahnya yaitu:

1. Bagaimanakah strategi Kepala Madrasah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan pada MTs Al-Falah Karangtanjung di Kabupaten Pandeglang?
2. Bagaimanakah kepemimpinan Kepala Madrasah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan pada MTs Al-Falah Karangtanjung di Kabupaten Pandeglang?
3. Bagaimanakah mutu pendidikan pada MTs Al-Falah Karangtanjung di Kabupaten Pandeglang?
4. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung Kepala Madrasah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan pada MTs Al-Falah Karangtanjung di Kabupaten Pandeglang?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui strategi yang digunakan Kepala Madrasah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan pada MTs Al-Falah Karangtanjung di Kabupaten Pandeglang
2. Untuk mengetahui kepemimpinan Kepala Madrasah MTs Al-Falah Karangtanjung di kabupaten Pandeglang.
3. Untuk mengetahui pencapaian mutu pada MTs Al-Falah Karangtanjung di kabupaten Pandeglang
4. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung Kepala Madrasah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan pada MTs Al-Falah Karangtanjung di kabupaten Pandeglang.

b. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain :

1. Kegunaan Ilmiah

- 1) Diharapkan dapat menemukan konsep baru tentang strategi Kepala Madrasah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan Madrasah agar dapat diterapkan dalam penelitian selanjutnya.
- 2) Sebagai bahan masukan penelitian awal bagi yang berkehendak melakukan penelitian secara detail tentang kompetensi Kepala Madrasah dalam peningkatan mutu Sekolah.

2. Kegunaan Praktis

- 1) Secara praktis penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada pemerhati pendidikan pada umumnya dan khususnya bagi kalangan akademis baik dari kaum pendidik terutama kepada guru, dan manajemen pendidikan, juga diharapkan dapat memberikan khasanah kepustakaan tentang masalah yang terkait dengan pembahasan ini.

- 2) Sebagai bahan masukan kepada berbagai pihak terutama kepada pihak Madrasah aliyah di kabupaten pandeglang dalam rangka peningkatan mutu pendidikan siswanya.

F. Kajian Pustaka

Penelitian ini terfokus pada Strategi Kepala Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTs Al-Falah Karangtanjung.

Strategi adalah ilmu dan seni menggunakan kemampuan bersama sumber daya dan lingkungan secara efektif yang terbaik. Kemampuan, sumber daya, lingkungan dan tujuan merupakan empat unsur penting dalam pengertian strategi. Empat unsur tersebut, sedemikian rupa disatukan secara rasional dan indah sehingga muncul beberapa alternatif pilihan yang kemudian dievaluasi dan diambil yang terbaik.

Dalam hal ini kepala berperan sebagai seorang manajer, edukator dan supervisor. Pemimpin berasal dari kata *leader*

yang berarti memimpin.¹⁵ Pemimpin adalah orang yang dapat memberikan pengaruh atau mempengaruhi perilaku orang lain untuk mencapai tujuannya. Menggunakan kekuasaan merupakan kemampuan untuk mengerahkan dan mempengaruhi bawahannya sehubungan dengan tugas-tugas yang harus dilakukan.¹⁶ Sedangkan menurut Koontz dan Donnel, kepemimpinan adalah suatu proses dan seni yang mempengaruhi sekelompok orang sehingga mereka mau bekerja dengan sungguh-sungguh untuk meraih tujuan kelompok.¹⁷

Menurut Stogdill, kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi aktivitas kelompok dalam rangka pencapaian dan pemuasan tujuan. Sedangkan menurut George Terry, kepemimpinan adalah kegiatan dalam mempengaruhi orang

¹⁵ John M Echols dan Hasan Sadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta : Gramedia 1997),h.351

¹⁶ Jamal Ma'mur Asmani, *Manajemen Pengelolaan dan Kepemimpinan Pendidikan Professional: Panduan Quality Control Bagi Para Pelaku Lembaga Pendidik*, (Yogyakarta: Diva Press, 2009), cet ke-1, h. 92-94

¹⁷ Husaini Usman, *Manajemen Teori Praktik & Riset Pendidikan*, (Jakarta : bumi Aksara 2008), h. 274

lain untuk bekerja keras dengan penuh kemauan untuk tujuan kelompok.¹⁸

Menurut Dirawat dkk, dalam bukunya "*pengantar kepemimpinan pendidikan*" yang menyatakan bahwa: seorang pemimpin atau kepemimpinan artinya memiliki kemampuan dan kesiapan untuk dapat mendorong, mempengaruhi, mengajak, menggerakkan, menuntun, dan jika perlu memaksa orang lain agar mau menerima pengaruh itu dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu mencapai maksud dan tujuan tersebut.¹⁹

Kepemimpinan adalah hubungan yang erat antara seseorang dengan sekelompok manusia karena adanya kepentingan bersama, hubungan itu ditandai oleh tingkah laku yang tertuju dan terbimbing dari pada manusia yang seorang itu. Manusia atau orang ini biasanya disebut dengan pemimpin, sedangkan kelompok manusia yang mengikutinya disebut yang dipimpin.

¹⁸ Stogdil, *Kepemimpinan & Perilaku Organisasi*,(Jakarta : PT Grafindo 2012), h. 3

¹⁹ Dirawat dkk, *Pengantar Kepemimpinan Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional cet III,1986), h. 23

Kepala Madrasah memiliki dua peranan utama, yaitu pertama sebagai pemimpin lembaga bagi para guru dan kedua sebagai pimpinan dalam memanaajemen sebuah lembaga. Untuk mengetahui peran Kepala Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan dapat dilihat melalui bagaimana Kepala tersebut berperan sebagai edukator, manajer dan supervisor.

Sebagai edukator atau sebagai pendidik haruslah memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalitas tenaga kependidikan di Madrasah, menciptakan iklim mandrasah yang kondusif, memberikan nasehat kepada warga Madrasah, memberikan dorongan dorongan kepada seluruh tenaga kependidikan, serta melaksanakan model pembelajaran yang menarik.²⁰

Dikatakan sebagai manajer apabila seorang pemimpin dapat melakukan manajemen yaitu merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, memimpin dan mengendalikan usaha para anggota organisasi serta

²⁰ E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Madrasah Profesional dalam Konteks Menyukseskan MBS dan KBK*, (Banung : Rosdakarya 2004), h.98

mendayagunakan seluruh sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan. Kepala Madrasah harus memiliki strategi yang tepat untuk mendayagunakan tenaga kependidikan melalui kerjasama atau kooperatif, memberi kesempatan kepada para tenaga kependidikan untuk meningkatkan profesinya dan mendorong keterlibatan seluruh tenaga kependidikan dalam berbagai kegiatan yang menunjang program Madrasah

Menurut Suharsimi Arikunto dikatakan bahwa supervisi merupakan kegiatan mengamati, mengidentifikasi mana hal-hal yang sudah benar, mana yang belum benar, dan mana pula yang tidak benar dengan maksud agar tepat dengan tujuan memberikan pembinaan.²¹ Kegiatan pokok dalam supervisi itu adalah melakukan pembinaan kepada Madrasah pada umumnya dan guru pada khususnya agar kualitas pembelajaran meningkat. Kegiatan utama di Madrasah dalam rangka mewujudkan tujuan adalah kegiatan pembelajaran, sehingga seluruh aktivitas organisasi

²¹ Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Supervisi*, (Jakarta : Rineka Cipta 2006), h.5

Madrasah bermuara pada pencapaian efisiensi dan efektivitas pembelajaran.

Kepala Madrasah sebagai penentu kebijakan di Madrasah juga harus menfungsikan perannya secara maksimal dan mampu memimpin Madrasah secara bijak dan terarah serta mengarah kepada pencapaian tujuan yang maksimal demi meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di Madrasah yang tentu saja akan berimbas pada kualitas lulusan peserta didik sehingga membanggakan dan menyiapkan masa depan yang cerah.

Mutu mengandung makna derajat keunggulan suatu produk atau hasil kerja yang dapat dirasakan untuk memuaskan kebutuhan yang dispesifikasikan menurut input, proses dan output pendidikannya. Baik buruk mutu suatu pendidikan pada lembaga pendidikan tergantung dari bagaimana pengelolaan lembaga tersebut. Mutu dapat dikatakan baik jika lembaga tersebut dapat mengelola semua potensi Sekolah tersebut dengan maksimal dan baik seperti sarana prasarana dan sumber daya manusianya. Dan

sebaliknya mutu tersebut akan buruk apabila dalam pengelolaan Sekolah cenderung abai dan tidak memanfaatkan segala potensi yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan penelitian ini terdiri dari lima bab atau lima komponen yang memiliki pembahasan secara tersendiri, tetapi saling berkaitan antara bab satu dengan bab yang lainnya sehingga menjadi satu kesatuan yang menghasilkan suatu karya ilmiah. Untuk mengetahui gambaran umum isi tesis ini, maka pada setiap babnya, penulis akan kemukakan garis besar tesis ini sebagai berikut:

Bab pertama, sebagai bab pendahuluan menguraikan hal-hal yang menjadi latar belakang penulisan penelitian ini, juga dirumuskan permasalahan-permasalahan yang nantinya dikaji dalam bab pembahasan. Permasalahan ini menyangkut aspek strategi Kepala Madrasah dalam melakukan proses penilaian dan pembinaan di Madrasah yang dibinanya dengan berbagai teori-teori yang telah ada. Setelah rumusan masalah tuntas dijelaskan dan ditemukan sebuah pokok

masalah yang dikaji. Selanjutnya dirumuskan beberapa sub masalah sebagai suatu kesatuan yang akan difokuskan pada pencarian alternatif terhadap pokok-pokok masalah tersebut. Selanjutnya untuk memudahkan memahami penelitian ini, maka dibuat pengertian judul dan batasan operasional, yang diharapkan bisa menjelaskan secara tuntas maksud dari judul dan isi penelitian nantinya. Selanjutnya dalam bab pertama ini juga diuraikan tentang tujuan dan kegunaan dalam penulisan tesis ini, baik itu kegunaan teoritis, maupun praktis. Terakhir dari bab ini menjelaskan sistematika atau garis besar isi tesis.

Bab kedua memuat tentang tinjauan pustaka. Uraianya meliputi: strategi, pengertian strategi, kepemimpinan, pengertian kepemimpinan serta tipe-tipe kepemimpinan. Peningkatan mutu, hakikat mutu, hakikat pendidikan, pengertian mutu pendidikan, prinsip-prinsip mutu pendidikan, faktor-faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan, karakteristik Sekolah yang bermutu, serta strategi peningkatan mutu pendidikan

Bab ketiga membahas metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, tahap-tahap penelitian, metode analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab keempat memuat hasil penelitian yang terdiri dari gambaran Madrasah aliyah, bentuk strategi Kepala Madrasah dalam upaya peningkatan mutu Madrasah dan hasil yang dicapai strategi Kepala Madrasah dalam upaya peningkatan mutu Madrasah pada MTs Al-Falah Karangtanjung di kabupaten pandeglang.

Bab kelima adalah penutup. Dalam bab ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dan implikasi dari hasil penelitian sesuai dengan hasil yang diperoleh dari penelitian ini.